

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Literatur Review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh sebagai bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian. Dalam hal ini literatur review diperlukan sebagai pembanding dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama berjudul *Kerjasama Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia* oleh Harry Bahtiar (2016). Penelitian ini berisi tentang bagaimana sejarah atau proses awal terjadinya kerjasama Indonesia – Jepang hingga tercetusnya sebuah perjanjian atau kerjasama ekonomi dalam berbagai bidang industri khususnya di Indonesia. Kerjasama ini semakin meluas dengan munculnya konsep *Free Trade Area* dalam hal perdagangan internasional yang dilakukan negara-negara maju. Kerjasama ini pun menjadi salah satu point kepentingan negara atau *national interest* dalam hal penguatan ekonomi di sektor industri baik untuk Indonesia maupun Jepang.

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini. Karena memiliki persamaan latarbelakang masalah yaitu kerjasama *Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

Penelitian kedua berjudul *Economic Partnership Agreement Indonesia – Japan* dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Di Indonesia oleh Ni'matul Fadhillah (2016). Penelitian ini berisi tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia – Jepang, Jepang banyak memberikan bantuan serta memberikan keuntungan bagi Indonesia, termasuk pada sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil yang merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia. Perkembangan industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia hingga Jepang memberikan bantuan berupa *capacity building* bagi industri-industri di Indonesia. Adapun dalam hal investasi, Jepang juga melakukan investasi di sektor industri TPT Indonesia yang direalisasikan menjadi bantuan dana untuk restrukturisasi mesin-mesin tua TPT agar meningkatkan produktivitas industri TPT Indonesia. Dari bantuan-bantuan yang diterima industri TPT Indonesia selama kerjasama berlangsung.

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini. Karena memiliki persamaan latarbelakang masalah yaitu dalam perkembangan industri tekstil pasca kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dan Jepang.

Berdasarkan penelitian mengenai konsep kerjasama ekonomi tersebut, penulis menggunakan sebagai acuan dalam penulisan untuk melihat penerapan dan peran dari kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia – Jepang hingga peningkatan dalam ekspor tekstil Indonesia ke Jepang.

2.2. Kerangka Teoritis

Sebagai penunjang dari penelitian ini, maka penulis akan memaparkan teori-teori para ahli yang berhubungan dengan tema, judul dan masalah yang dibahas dalam tulisan dan objek penelitian ini. Teori-teori ini dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi penulis dalam menulis penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan merupakan teori-teori yang berkait dengan permasalahan dalam Hubungan Internasional.

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian maka tujuan dari penelitian dan proses analisis permasalahan yang diteliti dapat didukung oleh teori-teori dan ditopang oleh pendapat para ahli. Dengan adanya kerangka pemikiran maka akan memudahkan penulis dan memberikan pedoman kepada penulis dalam melakukan penelitian. Penggunaan kerangka pemikiran yang ilmiah akan mempermudah analisa suatu masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten (Suriasumantri, 1985).

Kajian mengenai hubungan internasional muncul pasca Perang Dunia I pada tahun 1920-an dan menjadi bidang studi yang berdiri sendiri di Amerika dan Eropa (Mas'ood, 1990). Hubungan internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik *high politics*. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain

memfokuskan pada kajian hubungan politik antar negara yang ruang lingkungannya melintasi batas-batas wilayah negara, juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (non-state) (Rudy, 2011).

Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1987).

Pengertian dari hubungan internasional menurut **Banyu Perwita** dalam bukunya “Pengantar Hubungan Internasional” sebagai berikut:

“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.” (Perwita & Yani, 2014)

Politik Luar Negeri pada hakikatnya juga merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu negara dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional dan harus sesuai dengan tujuan nasional beserta sasarannya.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa “Politik Luar Negeri pada hakikatnya adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta jangka pendek dan jangka panjang” (Kusumaatmadja, 1983).

Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Relations*, yaitu “*Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest*” (Olton, 1982).

Dalam melakukan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas’oed, 1990). Pasca Perang Dingin, hubungan antar negara lebih erat dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan internasional melalui kerjasama internasional.

Menurut **K. J. Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti, 1988):

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.

- d) **Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.**
- e) **Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.**

Kerjasama merupakan salah satu dari interaksi antar aktor hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan setiap negara. EPA Indonesia-Jepang merupakan interaksi antara aktor hubungan internasional yang berbentuk kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang. EPA Indonesia-Jepang sebagai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang merupakan akibat dari hubungan interdependensi antara kedua negara tersebut. Kedua negara yang saling bergantung itu sepakat untuk melakukan kerjasama. Kerjasama itu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing negara, karena hubungan interdependensi antara negara merupakan ketergantungan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara.

Terbentuknya kerjasama IJEPA ini tidak terlepas dari sejarah diplomasi antara Indonesia dan Jepang dimana awal mulanya dimana Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Jepang pada tahun 1958 Jepang dan Indonesia memulai hubungan diplomatik bilateral secara resmi untuk memperbaiki hubungan diplomatik antar kedua negara. S.L Roy dalam buku *Diplomacy* mempunyai definisi tentang diplomasi yang diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut :

“Diplomasi yang sangat erat hubungannya dengan hubungan antar Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan Negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi

mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu Negara dengan cara negosiasi dengan Negara lain.” (Roy, 1995)

Diplomasi merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan, mewujudkan nilai atau menetapkan kepentingan terhadap negara yang tindakan dan perilakunya hendak ditangkal, diubah atau diperkuat. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun matang oleh suatu negara, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun pengertian kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Koesnadi Kertasmita dalam bukunya *Organisasi Internasional*, yaitu :

“Kerjasama Internasional terjadi karena *nation understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negar-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik”. (Kartasmita, 1983)

Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral. Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain :

- 1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*);
- 2) Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), kerjasama ini biasanya kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Selain bentuk-bentuk di atas, kerjasama internasional juga dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang termasuk kedalam kerjasama bilateral karena

dilakukan oleh dua negara. Serta kerjasama EPA Indonesia-Jepang termasuk kedalam kerjasama fungsional, yaitu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi antara kedua negara tersebut.

Kerjasama bilateral yang dikoordinasikan oleh Bagian Kerjasama Bilateral, lazimnya dapat dilaksanakan antara Indonesia dan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan atau *Agreement* yang akan menjadi dasar atas semua bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama dalam bidang perindustrian, ekonomi dan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia dan *capacity building*, dan bidang lainnya yang akan disepakati bersama oleh para pihak dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*).

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian memberikan penjelasan tentang munculnya istilah “perjanjian internasional” sebagai berikut : **“Yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan nasional” .**

Berikut adalah teori perjanjian internasional menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja**: “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu” (Kusumaatmaja & Agoes, 2003).

Kerjasama ekonomi antara dua negara termasuk kedalam studi Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi politik internasional merupakan

studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional (Perwita & Yani, 2014).

Mohtar Mas'oed mendefinisikan Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut :

“...tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antar “negara” dan “pasar”, antar lingkungan domestic dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat... ekonomi didefinisikan sebagai system produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpinan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi social dan ekonomi.” (Mas'oe

d, 2003)

Adapun definisi ekonomi internasional menurut **Boediono** dalam bukunya yang berjudul **ekonomi internasional**, adalah :

“Masalah –masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara yang lain. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil atau output Negara satu dengan yang Negara lain, hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi, hubungan ekonomi bisa berbentuk hubungan kreditnya” (Dr Budiono, 1981)

Menurut **Apridar** dalam bukunya Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya menjelaskan definisi Perdagangan Internasional sebagai berikut: “**Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.**” (Apridar, 2009)

Adapun tujuan dari ekonomi internasional seperti yang dijelaskan oleh **R.E.A Ma'oer** dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi internasional*, bahwa tujuan ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari ekonomi internasional adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, akan dipenuhi.” (Ma'moer, 1974)

Dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar negara, bangsa maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Adapun tujuan dari ekonomi internasional seperti yang dikemukakan oleh **Dominic Salvatore** dalam bukunya *Ekonomi Internasional*, yaitu “ Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu-membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan di dalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain” (Salvatore, 1990).

Dalam pelaksanaan ekonomi internasional harus ada pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional. **Carla Poli** dalam *Pengantar Ilmu Ekonomi* berpendapat tentang pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

“Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu. Suatu perekonomian tumbuh, apabila dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 10, 20, atau 50 tahun bahkan lebih lama lagi mengalami kenaikan pendapatan perkapita”. (Poli, 1992)

Menurut **Sumitro Djodjohadikusumo** dalam bukunya *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* mengatakan bahwa :

“Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri tergantung dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang mendukung pertambahan pendapatan nasional”. (Djojohadikusumo, 1994)

Data pendapatan per kapita dari berbagai negara pada suatu tahun tertentu, dan perubahannya dalam jangka waktu tertentu, sangat berguna dalam analisa pembangunan. Menurut **Boediono** dalam bukunya : *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, mengatakan bahwa :

“Jadi, perhatian utamanya adalah produktivitas negara tersebut tiap tahunnya, yang diukur dari tingginya *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita masyarakatnya menunjukkan kecenderungan untuk naik dalam jangka panjang”. (Budiono, 1985)

Untuk mengetahui kriteria Negara berkembang, perlu dilihat indikator pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di negara tersebut. Menurut pendapat T. May Rudi tentang tolak ukur Negara berkembang dalam bukunya *Masalah Negara Berkembang* sebagai berikut :

“Biasanya Kriteria utamanya adalah :

1. GNP perkapita (Pendapatan Nasional Kotor, dihitung jatah perkepala / per orang) sampai batas tertentu. Hal ini dapat berubah tiap tahun menurut perkembangan ekonomi dunia dan tingkat harga tertentu.
2. Andil industri (Manufaktur). Ini biasanya sampai batas dibawah 0% dari GNP untuk *Least Development*

Counters (LDCS), atau berkisar sampai 20% untuk *Development Countries*.

3. Tingkat pengangguran total. Batasnya kira-kira lebih dari 25% angkatan kerja yang ada.
4. Tingkat melek huruf yang masih dibawah 80% penduduk yang berumur 15 tahun ke atas atau yang buta huruf masih diatas 20%
5. Persentase urbanisasi diatas 3% setiap tahun
6. Tingkat pendidikan yang tercapai sebagian besar penduduk masih rendah.
7. Angka kematian bayi masih tinggi”.

Adapun konsep pembangunan ekonomi aktif menurut **Sumitro Djodjohadi** dalam synopsis *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* dinyatakan sebagai berikut :

“Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan (transisi) dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju tingkat ekonomi yang lebih maju. Ditandai oleh adanya pergeseran dari kegiatan di sektor produksi primer (sumber daya alam) ke sektor produksi sekunder (Industri manufaktur konstruksi) dan sektor tersier (jasa-jasa)” (Djojohadikusumo, 1994)

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan atau pertumbuhan suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Industrialisasi sendiri menurut **Edi Suwandi Hamid** dalam bukunya *Industrialisasi* mengatakan bahwa industrialisasi adalah :

“Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang di imbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar” (Hamid, 1990)

Negara-negara yang lemah dalam kekayaan relatifnya, namun kuat dalam daya saingnya, membutuhkan gerakan-gerakan strategis yang akan

memperbaiki posisi kekayaannya. Menurut **Alan. B Mountjoy** dalam bukunya, mengemukakan bahwa :

“Pilihan strategi industrialisasi banyak diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang khususnya untuk mengembangkan industri manufaktur karena pertama, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat pendapatan bersih per kapita nasional dan ketiga , untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran”. (Mountjoy, 1985)

Dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang, kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif dari bea masuk barang. Definisi dari tarif adalah “pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara (Nopirin Ph.D, 2013).

Tarif digolongkan menjadi tiga, antara lain (Nopirin Ph.D, 2013):

- 1) Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain.
- 2) Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
- 3) Bea Impor (*Import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam *custom area* suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan terakhir.

Dalam kerjasama EPA Indonesia-Jepang terdapat kegiatan ekspor dan impor, maka definisi dari keduanya sebagai berikut:

“Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.... Impor dapat diartikan membeli barang-barang

**dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang
dibayar dengan mempergunakan valuta asing.”**
(Purnamawati & Fatmawati, 2013)

Dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara tentu negara tersebut pasti membutuhkan bantuan negara lain untuk saling mendukung satu sama lainnya, yakni dengan melakukan sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Jepang mengantarkan kita dalam upaya membentuk kerjasama ekonomi dalam pertumbuhan industri dalam negeri melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang.

Pasar bebas IJEPA merupakan implementasi kerjasama antara Indonesia-Jepang yang meliberalisasi sektor perdagangan. Pasar itu sendiri menjadi sangat penting bagi kedua negara dalam pemanfaatannya Jepang menerapkan pasar bebas dalam perluasan sektor pasar dalam industri tekstil.

Dalam perjanjian IJEPA Indonesia dan Jepang pasti masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya yang harus terpenuhi. Karena pada dasarnya kerjasama dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Konsep mengenai hal ini memang sangat sulit generalisasikan mengenai apa saja yang termasuk dalam *national interest* melihat pemerintah yang berbeda-beda tiap negara yang tentu menghasilkan *national interest* yang berbeda pula, bahkan tidak jarang *national interest* duduk berlawanan antar negara satu dengan negara yang lain.

Berdasarkan data dan teori diatas, dapat ditarik beberapa asumsi yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut:

1. Munculnya WTO yang memiliki tujuan liberalisasi pasar di dunia membuat banyak bermunculan kerjasama-kerjasama perdagangan bebas antar negara sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian tujuan WTO.
2. Indonesia dan Jepang yang juga anggota WTO ikut berkontribusi dengan menyepakati *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA).
3. Dengan disepakatinya perjanjian bilateral tersebut diharapkan hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang semakin erat serta adanya peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia ke Jepang, salah satunya produk TPT Indonesia.
4. Selain peningkatan ekspor, diharapkan terdapat bantuan lain dari Jepang untuk meningkatkan perkembangan industri TPT Indonesia.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut :

“Jika *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) diimplementasikan melalui program *Manufacturing Industrial Development Center* (MIDEC), maka ekspor tekstil Indonesia ke Jepang akan meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan tekstil dan produk tekstil dari Jepang ke Indonesia.”